

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **IKA RAHMAWATI P., SP. M.Si.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **JEMMY FISCHER, SSTP**

Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Februari 2026

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Fkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA**


IKA RAHMAWATI P., SP, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19740109 200212 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran evaluasi dan pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen capaian IKU perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Jumlah laporan capaian IKU PD	77.94 1 Laporan
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terdistribusinya pembayaran gaji, tunjangan dan TPP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terverifikasinya dokumen pertanggungjawaban	Persentase capaian realisasi APBD perangkat daerah Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM Persentase dokumen pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	90% 100% 100%
3.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terbina dan terbimbingnya ASN tentang teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	77,17 10 orang
4.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	Nilai kematangan SPBE perangkat daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	3 1 dokumen
5.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik perangkat daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Nilai kepatuhan pencatatan pengadaan barang/jasa pemerintah SPSE Jumlah laporan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	75 1 laporan
6.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN DAERAH Terwujudnya penerapan SPBE perangkat daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terukurnya SKM pada layanan perangkat daerah	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SKM terintegrasi Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	3,25 1 Layanan

7.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional atau lapangan serta dibayarkan pajak dan perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor	Persentase barang milik daerah yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	100 55 unit 51 unit 3 unit
----	--	---	--

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD</i>	Rp. 397.862.000,- Rp. 397.862.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp. 6.853.884.016,- Rp. 5.448.300.016,- Rp. 1.405.584.000,-	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Rp. 36.491.400,- Rp. 36.491.400,-	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp. 59.423.799,- Rp. 59.423.799,-	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp. 36.470.250,- Rp. 36.470.250,-	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Rp. 574.992.788,- Rp. 574.992.788,-	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> <i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Rp. 1.069.183.100,- Rp. 619.933.500,- Rp. 51.089.600,- Rp. 398.160.000,-	APBD

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



JEMMY FISCHER, SSTP

Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA**

IKA RAHMAWATI P., SP, M.Si.

Pembina, IV/a
NIP. 19740109 200212 2 007